

**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI
SUMATERA BARAT
PADA ERA DESENTRALISASI FISKAL**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi S1 (Strata Satu) Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Negeri Padang*



Oleh:

RAHMAT

20060051

**DEPARTEMEN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

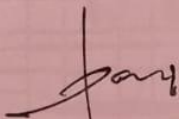
Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di
Sumatera Barat pada Era Desentralisasi Fiskal

Nama : Rahmat
Nim : 20060051
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, 23 Oktober 2025

Mengetahui,
Kepala Departemen Ilmu Ekonomi

Disetujui dan disahkan oleh,
Pembimbing



Dr. Novva Zulva Riani, S.E, M.Si
NIP. 1971104 200501 2 001



Yollit Permata Sari, S.E, M.Si
NIP.19910222 202203 2 0009

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

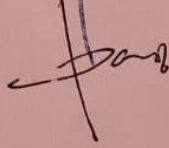
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi
Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*

**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT
PADA ERA DESENTRALISASI FISKAL**

Nama : Rahmat
Nim : 20060051
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, 23 Oktober 2025

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Yollit Permata Sari, S.E, M.Si	
2.	Anggota	Mike Triani, S.E, M.Si	
3.	Anggota	Dr. Novya Zulva Riani, S.E, M.Si	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat
NIM / Tahun Masuk : 20060051 / 2020
Tempat / Tanggal Lahir : Batang Silasih / 15 Februari 2001
Departemen / Keahlian : Ilmu Ekonomi / Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul Skripsi : Pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi sumatera barat pada era desentralisasi fiskal
No HP : 083895176102

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis (skripsi) saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Padang maupun Program Perguruan Tinggi Lainnya
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan orang lain, kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karta atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Karya tulis skripsi ini sah apabila ditandatangani asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, 13 September 2025
Yang menyatakan



Rahmat
20060051

ABSTRAK

Economic growth is an indicator of a country's success. The government plays an important role in accelerating economic growth through various fiscal policies. This study analyzes the effect of efficiency, effectiveness, independence of regional financial management, and regional income growth on district / city economic growth in West Sumatra in the era of fiscal decentralization. Secondary data for the period 2018-2022 from the Central Bureau of Statistics of West Sumatra Province and the ministry of economy were used. Panel data analysis method with the best model selection through Chow Test and Hausman Test is applied. Classical assumption tests such as multicollinearity and heteroscedasticity are also conducted for model validity. The results show that the effectiveness of local financial management has a negative and insignificant effect on economic growth, efficiency has a positive and significant effect, independence has a negative and significant effect, and the acceleration of local revenue growth has a positive and significant effect. Simultaneously, these variables have a significant and positive effect on economic growth in West Sumatra. The statistical model explains 87% of the variation in economic growth, the rest is influenced by other factors outside the model.

Keywords: *Economic Growth, Regional Financial Effectiveness, Regional Financial Efficiency, Regional Financial Independence, Regional Revenue Growth*

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan suatu negara. Pemerintah berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan fiskal. Penelitian ini menganalisis pengaruh efisiensi, efektivitas, kemandirian pengelolaan keuangan daerah, dan pertumbuhan pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat pada era desentralisasi fiskal. Data sekunder periode 2018-2022 dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dan kementerian ekonomi digunakan. Metode analisis data panel dengan pemilihan model terbaik melalui Uji Chow dan Uji Hausman diterapkan. Uji asumsi klasik seperti multikolinearitas dan heteroskedastisitas juga dilakukan untuk validitas model. Hasil menunjukkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, efisiensi berpengaruh positif dan signifikan, kemandirian berpengaruh negatif dan signifikan, serta percepatan pertumbuhan pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, variabel tersebut berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Model statistik menjelaskan 87% variasi pertumbuhan ekonomi, sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model.

Kata Kunci : **Pertumbuhan Ekonomi, Efektivitas Keuangan Daerah, Efisiensi Keuangan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Pertumbuhan Pendapatan Daerah**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilamin, segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “pengelolaan keuangan daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat Pada era desentralisasi fiskal”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi, Departemen Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Shalawat beserta salam kepada Nabiyuna Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menuju alam yang terang benderang dan dipenuhi ilmu pengetahuan sampai saat ini. Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang
2. Ibu Dr. Novya Zulva Tiani, S.E M.S.i selaku Kepala Departemen Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang
3. Ibu Yollit Permata Sari, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan dan memberikan kontribusi yang begitu besar kepada penulis dalam penulisan skripsi ini
4. Ibu Yollit Permata Sari, SE, M.Si selaku dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah mengarahkan penulis selama menempuh Pendidikan di

Departemen Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Negeri Padang

5. Seluruh dosen dan staff akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan nasehatnya kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Ibunda tercinta Lisma dan Almarhum Ayahanda Nurdin yang telah menjaga, membesarkan, mendidik, mendo'akan dan mengusahakan segala hal baik dengan penuh kasih dan sayang sehingga penulis senantiasa bersemangat dalam mencapai cita-cita dan menempuh pendidikan
7. Rensi Elvia Rahmi S.Pd, Silvia Putri S.Pd, Nadia, dan Novalia selaku kakak dan adik yang penulis banggakan, yang selalu menyumbangkan materi, motivasi, dan do'a kepada penulis.
8. Hermita Fitri S.Km selaku pasangan yang saya banggakan yang selalu support dan bantu dan menemani saya selama dalam pengerjaan skripsi ini baik dalam pahit maupun manisnya.
9. *and for the last, thank you to myself who always fights tirelessly, who never gives up in any situation. thank you for always being strong in any storm, thank you even though there is a lot of drama and crying every night this self never gives up even once. thank you to my beloved beat motorbike that always accompanies me in every journey that I have taken. a million loves for myself.*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Akhir sekali, penulis serahkan kepada Allah SWT. Amiin.

Padang,

Rahmat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Pertumbuhan Ekonomi	18
B. Kajian Teori	19
1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	19
2. Teori Desentralisasi Fiskal.....	20
3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen.....	22
C. Pengelolaan Keuangan Daerah	26
1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah	26
2. Pengelolaan Keuangan Daerah	28
3. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah	30
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	31
5. Kinerja Keuangan Daerah.....	35
D. Review Studi Terdahulu.....	40
E. Kerangka Konseptual.....	49
F. Hipotesis penelitian	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52
A. Ruang Lingkup Penelitian	52
B. Metode Penelitian Sampel	52
C. Metode Pengumpulan Data.....	52
1. Data Sekunder.....	53
2. Studi Kepustakaan	53
D. Definisi Operasional Variabel.....	53

1. Pertumbuhan Ekonomi	53
2. Tingkat Efektivitas.....	54
3. Tingkat Efisiensi	55
E. Teknik Analisis Data	57
F. Metode Analisis Data.....	58
1. Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel	59
2. Uji Asumsi Klasik.....	60
BAB IV PEMBAHASAN.....	66
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian	66
B. Deskripsi Variabel Penelitian.....	68
1. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	69
2. Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	73
3. Tingkat kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah.....	78
4. Pertumbuhan Pendapatan Daerah	82
5. Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat	86
C. Analisis Statistik Induktif	88
1. Penentuan Model Estimasi Data Panel	88
2. Uji Asumsi Klasik.....	91
3. Uji Regresi Data Panel.....	94
4. Uji Hipotesis	96
D. Pembahasan Hasil Penelitian	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data realisasi penerimaan PAD dan Target PAD Pemerintah Sumatera Barat, Tahun 2018 – 2022 (MiliarRupiah)	10
Tabel 1.2 Data realisasi Belanja dan Realisasi PAD Pemerintah Sumatera Barat,Tahun 2018 – 2022 (MiliarRupiah)	11
Tabel 1.3 Data pendapatan transfer daerah dan PAD Pemerintah Sumatera Barat, Tahun 2018 – 2022 (MiliarRupiah)	12
Tabel 2.1 Review Study Terdahulu	40
Tabel 3.1Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah	54
Tabel 3. 2Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah.....	55
Tabel 3. 3 Kriteria Kemandirian Kinerja Keuangan Daerah.....	56
Tabel 4. 1 Persentase Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	69
Tabel 4. 2 Persentase Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah	74
Tabel 4. 3 Persentase Indeks Kemandirian fiskal Daerah	79
Tabel 4. 4 Persentase tingkat Pertumbuhan Pendadapatan Daerah.....	83
Tabel 4. 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022 (%).....	87
Tabel 4.6 Uji Chou	89
Tabel 4. 7Uji Housman	89
Tabel 4. 8 Uji Multikolineritas	92
Tabel 4. 9 Uji .heterokedastisitas	93
Tabel 4. 10 Uji Regresi Data Panel	94
Tabel 4. 11Uji F.....	96

Tabel 4. 12 Uji T	97
Tabel 4. 13 Uji Determinasi (R^2).....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022 (%)	3
Gambar 1. 2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Tahun 2018 – 2022 (MiliarRupiah).....	13
Gambar 1. 3 Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Tahun 2018 -2022 (MiliarRupiah)	14
Gambar 4.1 Peta Wilayah Provinsi Sumatera Barat.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Tabel Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	117
Lampiran 2 : Tabel Tingkat Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	118
Lampiran 3 : Tabel indeks Kemandirian fiskal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	120
Lampiran 4: Tabel Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	121
Lampiran 5: Tabel Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.....	123
Lampiran 6 : Tabel Hasi Regresi Data Panel	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

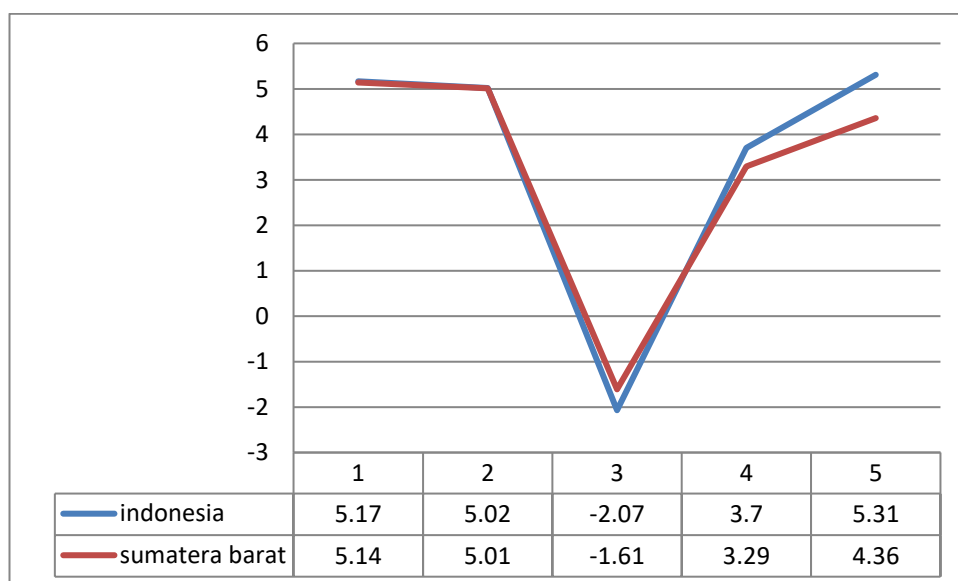
Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu dan dapat dikaitkan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Seperti yang kita ketahui Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur yang sangat berarti dalam kajian ekonomi makro, dalam pandangan yang luas pertumbuhan ekonomi menandakan bagaimana kegiatan ekonomi dapat menciptakan perubahan dalam struktur social masyarakat yang dapat menciptakan tambahan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Widiaty & Nugroho, 2020).

Perekonomian global pada tahun 2021 mengalami pemulihan walaupun masih dibayangi oleh penyebaran COVID-19 terutama pada varian delta dan omicron dan gangguan pada rantai pasokan. Disisi lain, terdapat berbagai kebijakan yang diterapkan oleh setiap negara seperti semakin kuatnya tuntutan akan ekonomi hijau dari Eropa dan AS dan pembatasan produksi di Tiongkok dan sejumlah negara produsen lain yang memerlukan masa transisi menuju ke produksi yang lebih ramah lingkungan.

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat salah satu keberhasilan suatu negara. Pemerintah

memiliki peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu bagian dari kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk Nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional.

Gambar 1. 1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022 (%)



Berdasarkan dari data BPS, dilihat dari grafik di atas antara rentang tahun 2018 sampai 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata berkisar 5 % per tahunnya. Pada tahun 2018, Sumatera Barat tumbuh sekitar 5,14 %, sejalan dengan Nasional. Namun, Pada tahun 2020, akibat pandemi pertumbuhannya terkontraksi menjadi -1,61 %, sedangkan Indonesia secara keseluruhan tumbuh -2,07 %.

Di 2021, pemulihan terjadi dengan Sumatera Barat tumbuh sekitar 3,29 % dan Indonesia 3,7 %. Pada tahun 2022 Sumatera Barat mencapai pertumbuhan sekitar 4.36 %, sedangkan Indonesia mencapai 5.31 %, . Secara keseluruhan, meski Sumatera Barat lebih rentan terhadap guncangan, tren pemulihannya menunjukkan harapan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di masa depan.

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan peningkatan jangka panjang kemampuan suatu negara dalam menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada masyarakatnya, kemampuan ini berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan serta ideologis yang diperlukannya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan keharusan dalam peningkatan kesejahteraan dan kelangsungan pembangunan ekonomi (Dinar and Hasan 2018). Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah karena dengan diadakannya otonomi daerah maka pemerintah dapat leluasa untuk mengurus, mengembangkan, dan menggali potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Ngurah and Kartika, 2014:81).

Otonomi daerah sebagaimana yang dijelaskan di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 ayat 2 dimana pemerintah masing-masing daerah mengurus dan mengatur kepentingan pemerintahan mereka sendiri sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta kemampuan bersaing suatu daerah sehingga dapat menjadikan masyarakat

lebih sejahtera. Dijelaskan menurut UU tentang Keuangan Negara, terletak penekanan pada sektor pengelolaan keuangan, dimana pemerintah memiliki kuasa atas pengelolaan keuangan. Kekuasaan tersebut diberikan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan pusat kepada gubernur, bupati maupun walikota sebagai kepala pemerintahan daerah. untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah perlu melakukan pengoptimalan terhadap anggaran secara ekonomi, efisien dan efektif (value for money) guna mempertanggung jawabkan kepada publik agar mampu menumbuhkan kesejahteraan bagi masyarakat. Ekonomi adalah memilih dan menggunakan sumber daya yang memiliki kualitas sesuai dengan standar yang ditentukan dengan harga rendah. Efisien adalah menggunakan uang masyarakat (public money) untuk memaksimalkan hasil output (berdaya guna). Efektif adalah menggunakan dana yang telah tersedia agar tercapainya semua target dan kepentingan bersama.

Hal yang terjadi selama ini bias kita lihat bahwa pengelolaan keuangan daerah cukup memprihatinkan dimana dengan sebagian besar penerimaan daerah tidak dialokasikan dengan semestinya sehingga berdampak pada lambatnya laju pertumbuhan ekonomi di beberapa

daerah. Selain itu anggaran yang dialokasikan tetapi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan yang menjadi skala utama dapat menjadi cerminan buruk bagi perspektif ekonomi, efisien dan efektif pengelolaan keuangan daerah. karena kualitas perencanaan anggaran daerah relatif lemah. Rendahnya perencanaan anggaran serta ketidakcukupan pemerintah daerah dalam menumbuhkan pendapatan daerah secara terus menerus. Di sisi lain Sementara itu pengeluaran daerah terus mengalami peningkatan, yang nantinya akan muncul fiscal gap. Kondisi tersebut dapat memunculkan underfinancing atau overfinancing dan pada saatnya mengganggu tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas unit kerja Pemerintah Daerah.

Selain itu, pemerintah pusat menuntut agar pemerintah daerah lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah yang dipimpinnya. Sesuia dengan UU No. 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah merupakan gambaran yang memperlihatkan bahwa pemerintah daerah mampu membiayai serta mempertanggungjawaban keuangan daerahnya sebagai asas desentralisasi. “Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah” (Halim, 2007:232).

Penelitian Hamzah (2008) menyimpulkan bahwa secara tidak langsung antara kinerja keuangan berupa rasio kemandirian dan rasio

efisiensi berpengaruh terhadap pengangguran dan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Kemandirian dan pengelolaan secara ekonomis, efektif, dan efisien suatu daerah atau wilayah akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Aparatur daerah disamping itu juga dapat secara inisiatif dan kreatif dalam mengelola daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Terlebih penting lagi adalah dengan adanya desentralisasi fiskal, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat, baik yang sifatnya langsung disalurkan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung disalurkan, seperti pembangunan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Dengan demikian penyediaan barang-barang publik dan pelayanan publik akan lebih terjamin.

Ketergantungan transfer yang merupakan indikator dalam pelaksanaan desentralisasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. ketergantungan transfer menggambarkan seberapa besar ketergantungan daerah terhadap dana yang ditransfer oleh pusat dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Indikator tersebut dihitung dari rasio antara dana transfer dengan total penerimaan daerah.. Hal ini sejalan dengan penelitian (Nantharath et al., 2019) yang memiliki hasil bahwa ketergantungan transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka pengoptimalan peningkatan ekonomi di daerah yang merujuk pada UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah, dimana dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah dituntut untuk mampu berorientasi secara universal. Sehingga berdampak pada peningkatan persaingan antar negara yang nantinya juga berdampak bagi perekonomian Indonesia terutama di daerah-daerah. Oleh sebab itu, otonomi ataupun desentralisasi bukan lagi menjadi challenge bagi pemerintah namun masing-masing daerah didorong mampu meningkatkan daya saingnya (Tampilang, Koleangan dan Wauran, 2019).

Keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban dari setiap daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, restribusi atau sumber penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban daerah, didalam pengeluaran dana demi melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah. Keuangan daerah menjadi bagian dari keuangan negara yang dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu pada pasal 16 ayat 1 menyebutkan APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD merupakan suatu bentuk nyata rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif yang mengkaitkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang (anggaran), untuk mencapai tujuan yang

direncanakan dalam jangka waktu tertentu dalam satu tahun anggaran (periode anggaran). Hal ini menunjukkan APBD digunakan pemerintah daerah sebagai acuan dalam hal penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran yang menyangkut hal-hal penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah.(Manimbaga et al., 2021)

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan akan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD). APBD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. APBD merupakan wujud perencanaan penganggaran yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah dan mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan daerah sangat penting guna peningkatan kesejahteraan masyarakat

Menurut Halim (2007: 234-241), pengukuran efektivitas dan efisiensi keuangan daerah dapat dilakukan dengan menghitung Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Rasio Efektivitas merupakan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Sementara Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan realisasi pengeluaran (belanja) dengan realisasi penerimaan daerah.(Trianto, 2016)

Selanjutnya Siregar, dkk (2017) meneliti tentang Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa analisis efektivitas pada ADD terlihat beragam di Kabupaten Deli Serdang, jika dilihat dari analisis lebih lanjut, hal tersebut dapat terjadi karena kemampuan penyerapan anggaran pada desa yang memiliki rasio efektif 100% sangat baik, beberapa program dilakukan sesuai dengan kemampuan anggaran, sehingga dana ADD dapat dipergunakan secara keseluruhan, namun sebaliknya desa Medan Estate dinilai belum mampu melakukan penyerapan anggaran secara baik dan maksimal, Pada analisis Efisiensi terlihat bahwa Pengelolaan Keuangan Desa kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2016, melalui penggunaa ADD dan DD tahun 2016, cenderung terlihat bahwa masih kurang efisien, baik itu penggunaan ADD maupun DD, meskipun beberapa desa terlihat mampu mengefisiensikan ADD maupun DD pada tahun anggaran tersebut.(Siregar, 2017)

Tabel 1.1 Data realisasi penerimaan PAD dan Target PAD Pemerintah Sumatera Barat, Tahun 2018 – 2022 (MiliarRupiah)

Tahun anggaran	Realisasi (Rp)	Target (Rp)
2018	6.292.287.631,03	6.094.000.000,00
2019	6.390.337.204,58	6.410.000.000,00
2020	6.364.065.756,24	6,400.000.000,00
2021	6.706.053.462.905	6,400.000.000,00
2022	6.121.808.187.754	6.652.314.674.092

Sumber : BPS Sumatera Barat

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2018 realisasi PAD Sumatera Barat sangat Baik bahkan melebihi target yang dianggarkan, pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2019 sampai 2020 PAD mengalami penurunan hal itu terjadi karena terjadinya wabah Covid-19. Pada tahun 2021 PAD Sumatera Barat kembali mengalami peningkatan.

Tabel 1.2 Data realisasi Belanja dan Realisasi PAD Pemerintah Sumatera Barat, Tahun 2018 – 2022 (MiliarRupiah)

Tahun anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2018	6.267.376.231,09	6.292.287.631,03
2019	6.551.278.880,64	6.390.337.204,58
2020	6.408.377.788,34	6.364.065.756,24
2021	6.464.906.658,35	6.706.053.462,905
2022	6.261.806.336,82	6.121.80.8.187,754

Sumber : BPS Sumatera Barat

Pada tabel diatas menyajikan terjadinya fluktuuasi tiap tahun dari 2018 smpai 2022, pada tahun 2019 – 2020 terjadinya peningkatan belanja daerah hal ini terjadi karna maraknya virus pandemic namum pada tahun beriktnya realisasi belanja maupun realisasi PAD kembali mengalami penuruunan.

Tabel 1.3 Data pendapatan transfer daerah dan PAD Pemerintah Sumatera Barat, Tahun 2018 – 2022 (MiliarRupiah)

Tahun anggaran	Pendapatan Transfer (Rp)	PAD (Rp)
2018	4.023.235.860,30	2.275.090 .068,59
2019	4.185.073.591,90	2.328.432.873,68
2020	4.396.280.576,60	2.255.072.985,43
2021	.4.077.691.924,34	2.251.899.163,31
2022	3.192.216.355,42	2.851.966.014,89

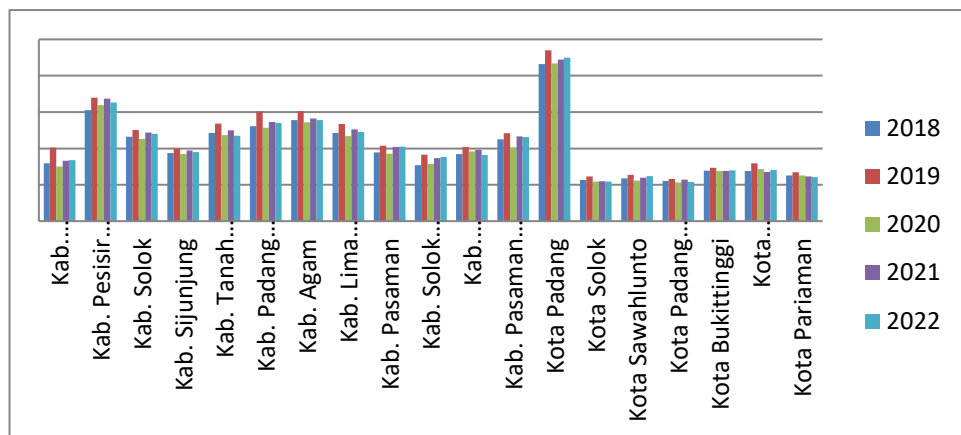
Sumber : BPS Sumatera Barat

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa terjadinya fluktuasi tiap tahunnya, terjadinya Pandemi Covid19 pada tahun 2019 sampai 2020 pemerintah Sumatera Barat mengalami penuruunan terhadap PAD sehingga pemerintah harus bergantung pendapatan transfer dari pemerintahan pusat namun pada tahuun beriktnya PAD sumatera Barat kembali mengalami peningkatan.

Berdasarkan informasi dari Laporan Realisasi Anggaran maka dapat dilakukan analisis kinerja keuangan daerah guna untuk mengevaluasi apakah telah menggunakan APBD secara mandiri karena untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi salah satunya di uukur melalui konerja keuuangan daerah. Pengukuuran kinerja keuangan daerah sangat pnting untuk akuntabilitas dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan hanya menunjukkan bagaimana uang di belanjakan namun meliputi kemampuan untuk

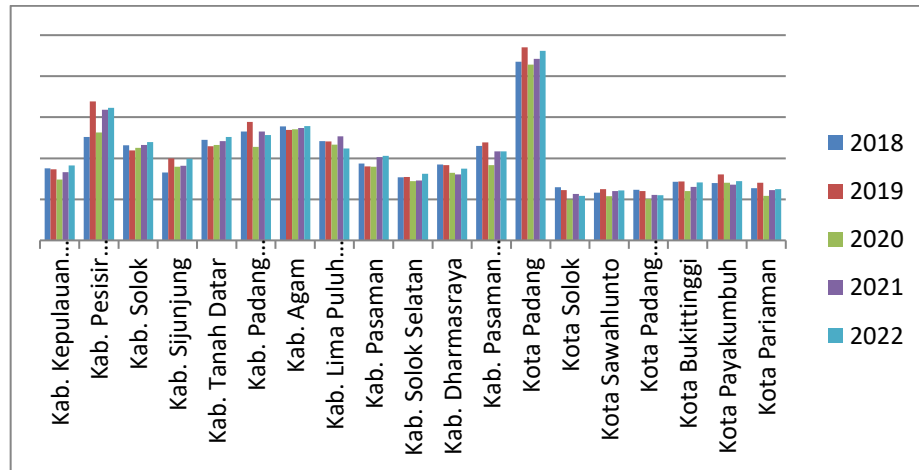
menunjukkan bahwa uang public tersebut telah dibelanjakan secara efektif, dan efisien.

Gambar 1. 2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Tahun 2018 – 2022 (MiliarRupiah)



Berdasarkan data dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan paling rendah di antara kabupaten/kota lainnya adalah Kota Solok. Realisasi pendapatan terendah kedua adalah Kota Padang Panjang yang diikuti oleh Kota Sawahlunto. Pada umumnya penerimaan kabupaten/kota sebagian besar berasal dari dana perimbangan, terutama diperoleh dari Dana Alokasi Umum. Sementara pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah masing-masing kabupaten/kota masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena masing-masing kabupaten/kota belum bisa mengelola kemampuan daerah lebih maksimal.

Gambar 1. 3Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Tahun 2018 -2022 (MiliarRupiah)



Seiring dengan pendapatannya, belanja Kota Padang juga melahirkan pengeluaran terbesar dibanding kabupaten/kota lain. Belanja terbesar kedua juga berada pada Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Agam. Semakin tinggi pengeluaran investasi pemerintah, semakin rendah kinerja keuangan pemerintah. Belanja modal belum mampu memberikan kontribusi penuh terhadap kemajuan pendapatan daerah sehingga kinerja keuangan pemerintah kurang baik.

Kebijakan Anggaran “adalah acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara arah kebijakan keuangan“ daerah adalah kebijakan penyusunan “program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan “belanja daerah secara efektif dan efisien. Dalam mempertanggungjawabkan kepada publik, pemerintah daerah “diwajibkan melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan dengan penjelasan di atas, “peneliti sebagai mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan dengan konsentrasi ekonomi publik tertarik “untuk berpartisipasi dalam melakukan “pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban terhadap publik dengan melihat bagaimana “pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota di Sumatera Barat pada era desentralisasi” fiskal saat ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bagaimana pengaruh rasio efisiensi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh tingkat efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh indeks kemandirian fiskal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat?
4. Bagaimana pengaruh tingkat pertumbuhan pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat?
5. Bagaimana pengaruh rasio efektivitas, rasio efisiensi, indeks kemandirian fiskal daerah dan tingkat pertumbuhan pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh pengaruh rasio efisiensi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengaruh indeks kemandirian fiskal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
4. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pertumbuhan pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
5. Untuk menganalisis pengaruh rasio efektivitas, rasio efisiensi, indeks kemandirian fiskal daerah dan tingkat pertumbuhan pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya ilmu makro ekonomi, yaitu terkait dengan desentralisasi fiskal dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan penulis dalam melakukan suatu penelitian terutama yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal dan kualitas

pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- c. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan fiskal di masa yang akan datang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tingkat Efektivitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila terjadi peningkatan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sumatera Barat, Maka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dan tidak signifikan.
2. Tingkat efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila terjadi peningkatan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Sumatera Barat, maka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat juga akan meningkat, begitu sebaliknya.
3. Tingkat kemandirian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Artinya apabila tingkat kemandirian pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan maka pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dan signifikan dan begitu sebaliknya
4. Percepatan pertumbuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, jika percepatan pertumbuhan pendapatan daerah di Provinsi Sumatera Barat

meningkat akan mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Begitu sebaliknya.

5. Variabel rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah rasio percepatan pertumbuhan pendapatan dan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat, yang artinya yaitu berarti ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.
6. Sebanyak 47.14 % variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel independent dengan model statistik. Adapun variabel independennya adalah tingkat efektivitas, tingkat efisiensi, dan tingkat kemandirian, dan tingkat percepatan pertumbuhan pendapatan daerah. Sedangkan 52.86 % sisanya dijelaskan oleh faktor lainnya diluar model.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan untuk lebih efisien dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya, sehingga dapat memiliki pengeluaran yang lebih efektif yang nantinya akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mengoptimalkan proses penyusunan anggaran

pendapatan dan belanja daerah serta lebih bijak dalam penggunaan anggaran agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.

2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu meningkatkan kemampuan perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan keuangan daerah agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat dimaksimalkan dan digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan ekonomi di wilayah ini.
3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya melakukan penelitian dengan melibatkan variable-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini sehingga dapat memperkaya khasanah ilmu dan pengetahuan terutama dalam kajian ilmu ekonomi yang menyoroti tentang Pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggiriawan, P. B., & Kawisana, P. G. W. P. (2020). *Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa. E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2281.
<https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p09>
- Widyasanti, A., Rahayu, A. Y., Zain, S. 2017. Pembuatan sabun cair berbasis virgin coconut oil (VCO) dengan penambahan minyak melati (Jasminum sanbac) sebagai esential oil. *Jurnal Teknotan*. 11(2): 1-10.
- Azwar, 2021 *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017- 2021 Jurnal Manajemen Keuangan Publik* Volume 7, No. 1, (p.1-25) e-ISSN: 2581-1207
- Defitri, S. Y., Mahaputra, U., & Yamin, M. (2018). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3(1), 64–75.
- Hafan, F. A. (2019). *Analysis of The Performance of Regional Financial Management and The Effect On Poverty Levels In Magelang Regency*
- Mardiasmo. 2021. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:
- Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. 2020. *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 5 No.2*.
- Pangaribuan, R. S. 2020. *Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Tobasa Provinsi Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara*.

- Primanto, A. 2020. *Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*. Malang: Intelegensia Media.
- Rante, A., Mire, M. S., & Paminto, A. 2018. “*Analisis kemandirian keuangan daerah*”. *Inovasi*, 13(2), 92.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Yohanes Susanto, S. W. (2021). *Analysis of Regional Financial Management of North Bengkulu District Towards Regional Independence in The Autonomy Era*. 1-7.
- Ambya. (2023). *Ekonomi Keuangan Daerah*.
- Antasena, D., Crisstin, Y., & Silawati, D. (2023). *Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. 3(1).
- Canavire-Bacarreza, G., Martinez-Vazquez, J., & Yedgenov, B. (2020). Identifying and disentangling the impact of fiscal decentralization on economic growth. *World Development*, 127. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104742>
- Feby Kinanda. (2021). Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, 2(2), 88–99. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v2i2.54>
- Kemenkeu. (2019). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Dana Alokasi Umum. *Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, Dan Keuangan Daerah*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=1776>
- Manimbaga, F., Sondakh, J. J., & ... (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi

- Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset ...*, 9(2), 982–992.
- Marwan, J., Moeljadi, Ananda, C. F., & Djazuli, A. (2017). the Perspective of the Agency Theory in Budget Preparation of Local Government and Its Implementation on Budget Performance and Financial Decentralization To Realize Performance of Local Government of Regencies and Cities in Banten Province. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 62(2), 117–128. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2017-02.14>
- Ropa, M. O. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 738–747.
- Siregar, F. A. (2017). *Analisis_Efektifitas_Dan_Efisiensi_Penge*. 2(4), 93–106.
- Trianto, A. (2016). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12(1), 65–77. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.92>